

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi kota Bandung pada saat ini masih mengalami keadaan yang kurang mengembirakan dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (*LPE*) Kota Bandung yang baru mencapai 5,40 %¹. Bila dibandingkan dengan 3 (*tiga*) tahun kebelakang yaitu pada tahun 1999 dengan tingkat *LPE* sebesar 2,80 %, berarti ada kemajuan dalam perekonomian kota. Tetapi hal tersebut belum menjadikan suatu kenaikan yang signifikan karena bila dibandingkan pada 4 (*empat*) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1996 *LPE* adalah 9,31 %. Walaupun demikian, kota Bandung masih merupakan kota yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk kota-kota disekitarnya dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal tersebut mendorong terjadinya migrasi/urbanisasi penduduk dari desa/kota-kota kecil disekitarnya ke dalam kota Bandung. Dengan melihat perkembangan pola kehidupan '*commuter*' pertumbuhan penduduk kota Bandung saat ini mencapai 2,39 % per tahun yang terdiri atas pertumbuhan alami sebesar 1 % dan akibat urbanisasi mencapai 1,32 %. Perkembangan jumlah penduduk kota Bandung dapat dilihat pada tabel 1.

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk sebagaimana disampaikan diatas, ternyata menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan dan kehidupan kota. Pandangan yang menyebutkan bahwa sumber daya alam sebagai faktor modal tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan produksi memang sudah dikoreksi, namun pada kenyataanya dilapangan memberikan keadaan yang lain dengan terjadinya eksplorasi alam

¹ Kantor Badan Pusat Statistik kota Bandung, thn 2000

dan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup (*sumber corporate plan PD Kebersihan Kota Bandung tahun 1999*)

Tabel 1. Perkembangan jumlah Penduduk

Nomor	Tahun	Jumlah
1	1996	1.816,637
2	1997	1.816,552
3	1998	1.860,282
4	1999	1.868,913

Sumber : Bandung Dalam Angka 2000

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk sebagaimana disampaikan diatas, ternyata menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan dan kehidupan kota. Pandangan yang menyebutkan bahwa sumber daya alam sebagai faktor modal tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan produksi memang sudah dikoreksi, namun pada kenyataannya dilapangan memberikan keadaan yang lain dengan terjadinya eksplorasi alam dan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup (*sumber corporate plan PD Kebersihan Kota Bandung tahun 1999*). Doxiadis (Ahli Perencanaan kota di Yunani) pernah meramal bahwa kota-kota akan tumbuh dan berkembang semakin besar, luas serta perkasa. Kota (*polis*) akan menjadi kota raya (*metropolis*) kemudian menjadi kota Mega (*Megapolis*), kota dunia (*Eumenopolis*) yang apabila tidak dikelola secara hati-hati akan berakhir menjadi kota mayat (*Necropolis*). Demikian pula dengan Simonds (1986)² mengingatkan kita agar berhati-hati dalam mengelola kota dan lingkungan binaan manusia yang ada didalamnya. Pada kenyataannya saat ini bahwa para pengelola kota bersama kalangan pengusaha dan masyarakat luas secara bersama-sama melakukan apa yang disebut "*Ecological Suicide*" yakni pembangunan kota yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kendali.

² Corporate plan PD Kebersihan Kota Bandung tahun 1999.

Tekanan-tekanan tersebut ternyata dengan jelas pula menyebabkan daya dukung lingkungan kota untuk menetralkan zat-zat pencemar sebagai hasil sampingan aktivitas ekonomi dan pembangunan, industri, laju pertumbuhan penduduk, serta perubahan pola konsumsi masyarakat kota, semakin lama semakin menurun.

Maka akibat dari keadaan tersebut menjadikan sampah merupakan bagian dari kegiatan manusia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hasil buangan sehari-hari merupakan bukti adanya keterkaitan tersebut. Sejalan dengan perkembangan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan sehari-hari, maka permasalahan sampah telah menjadi perhatian tersendiri dalam pembangunan kota artinya hal ini sudah dianggap sebagai aspek penting yang tidak bisa diabaikan, dan turut mempengaruhi keberhasilan yang diinginkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu dari segi estetika kota merupakan alasan tersendiri bagi penanganan di bidang lingkungan hidup secara lebih baik lagi. tentunya permasalahan sampah perlu ditangani secara kontinyu atau terus menerus, karakteristik sampah yang banyak menimbulkan dampak yang negatif, seperti halnya polusi udara dan air, selain itu terganggunya kesehatan manusia maupun hewan peliharaan/ternak.

Maka untuk mengantisipasi dari hal tersebut diatas sebagai akibat dari aktivitas manusia yang berupa limbah sampah di kota Bandung, Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 02/PD/1985, jo Peraturan daerah nomor 15 tahun 1993 membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan kebersihan dengan tugas pokok melestarikan lingkungan hidup, khususnya memelihara serta meningkatkan kebersihan kota guna menjamin terwujudnya kota yang bersih dan sehat.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita adalah laju pertumbuhan timbulan dan berat limbah domestik padat (*sampah*). Pada kurun waktu 5 (*lima*) tahun mendatang, permasalahan pengelolaan pengangkutan limbah sampah akan semakin kompleks dan untuk itu diperlukan upaya sedini mungkin penanganannya sejak dari sumber sampah melalui suatu sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar, sampai dengan pembuangan akhir dan pengolahan pada tempat pembuangan akhir sampah.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk memperjelas keterkaitan permasalahan tersebut dapat ditunjukkan dari kemampuan Perusahaan Daerah Kebersihan dalam melayani pengangkutan sampah yang terjadi selama tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 baru mencapai 3 755.3 m³ perhari sampah yang dapat terangkut. Atau dengan asumsi bahwa sampah yang dibuang oleh setiap orang perhari 3.3 liter dan tingkat pemadatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 1.6 kali volume terangkut (*fersi PD Kerbersihan kota Bandung*), maka cakupan pelayanan Perusahaan Daerah kebersihan adalah 75 % atau baru dapat melayani 1.395.212 jiwa penduduk kota Bandung.

Tetapi dalam perjalannya Perusahaan Daerah Kebersihan sejak berdirinya tahun 1985 sampai dengan saat ini mengalami kondisi defisit anggaran. Hal tersebut secara nyata menyebabkan Perusahaan Daerah Kebersihan mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional pelayanan kebersihan seperti gerobak sampah, container besi, truk angkutan sampah, alat berat dan sarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) lainnya, maka dengan demikian Perusahaan Daerah Kebersihan sulit mengembangkan dan melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan keberadaan Perusahaan Daerah Kebersihan sekaligus mengurangi defisit anggaran perusahaan antara lain dengan penghematan pembiayaan, penggalan potensi

retribusi kebersihan, efisiensi dan efektifitas penggunaan peralatan dan prasarana yang ada, pengajuan peningkatan biaya pelayanan umum “*Public service*” kepada pihak pemerintah kota Bandung, dan usaha lainnya namun upaya-upaya tersebut masih belum dapat menutupi defisit anggaran perusahaan tersebut.

Meskipun dalam perjalanan operasional Perusahaan Daerah Kebersihan mengalami defisit anggaran tetapi dalam operasionalnya sehari-hari perusahaan ini mempunyai 3 (*tiga*) Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang sampai saat ini masih digunakan, dengan rangkaian kegiatan pengangkutan dari rumah tangga dan dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara dan dari tempat pembuangan sementara (*TPS*) tersebut baru diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (*TPA*)

Adapun sarana pemindahan yang digunakan dalam operasional pemindahan sampah saat ini yaitu, pada tingkat rumah tangga yang dikelola oleh rukun tetangga/rukun warga dipergunakan gerobak angkut sampah yang mengangkut sampah sampai pada tempat pembuangan sampah sementara (*TPS*) atau dapat disebut dengan transfer depo, sedang dari *TPS* menuju Tempat Pembuangan akhir (*TPA*) dilakukan dengan menggunakan truk sampah yang operasionalnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Kebersihan kota Bandung.

Bila melihat neraca aktiva dan pasiva perusahaan maka terdapat beberapa pos pengeluaran operasional yang perlu mendapatkan perhatian karena sangat berpengaruh pada biaya operasionalisasi pelayanan persampahan kepada masyarakat, sedangkan dengan keadaan keuangan Perusahaan Daerah Kebersihan yang terbatas, tuntutan pelayanan sampah pada masyarakat harus tetap berjalan, melihat keadaan tersebut maka perlu adanya suatu penghematan yang dilakukan melalui optimalisasi operasionalisasi pelayanan sehari-hari.

Dikarenakan biaya operasional pengangkutan sampah merupakan biaya kedua terbesar setelah biaya administrasi (*pembayaran gaji pegawai dan operasional administrasi kantor*) maka pada penelitian ini hanya membahas pada operasionalisasi pengangkutan sampah dengan membatasi pada biaya penggunaan Bahan Bakar Minyak (*BBM*), oli, ban dan biaya service yang berhubungan dengan jarak angkut kendaraan dalam satu tahun.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu bentuk mekanisme pelayanan pengangkutan sampah yang efektif dan efisien dengan karakteristik kota yang sesuai dengan kebutuhan fungsional serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.